

36.9302.0008.1

9302604.35

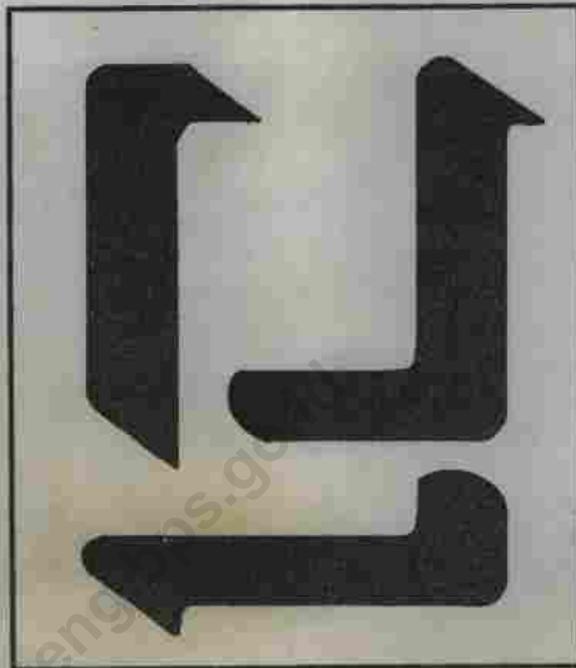
ISSN. 0126-4796

33561.9502

BUKU 2



**PENDAPATAN REGIONAL
JAWA TENGAH
1993**



**Kerjasama
BAPPEDA Tk. I dan KANTOR STATISTIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

KANTOR STATISTIK *BIPS* PROP. JAWA TENGAH



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

S A M B U T A N

Dalam memasuki Pembangunan Jangka Panjang Ke Dua, salah satu program yang mendapatkan prioritas penanganan adalah pengentasan penduduk miskin dan desa tertinggal.

Karena itu saya menyambut baik prakarsa Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Buku PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1993.

Harapan saya mudah-mudahan penerbitan Buku ini dapat menyajikan data yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kita menyadari, dalam perjalanan pembangunan dewasa ini dibutuhkan data yang bermanfaat guna mengeva luasi, menginventarisir dan merencanakan program yang akan dilaksanakan.

Ini berarti bahwa kebutuhan akan data sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah. Karena itu searah dengan amanat GBHN bahwa harapan yang ingin diwujudkan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, sehingga dapat memacu serta mendorong suksesnya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertumpu dari GBHN tersebut, bahwa manusia sungguh memainkan peran penting dalam pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu dengan penyajian data ini, kiranya akan merupakan referensi maupun gambaran setiap pelaku pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Jawa Tengah.

Semoga Buku ini memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN STATISTIK
JAWA TENGAH
P E N T A N G A N
P E N B A N G U N A N
D A E R A H
P R A K A T A
S E M A R A N G
1 9 9 4

Berkat rahmat Allah SWT publikasi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Tahun 1993 bisa terbit. Publikasi ini merupakan realisasi hasil pembangunan dibidang ekonomi secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian kami sangat gembira, karena dukungan dari berbagai pihak baik berupa data maupun informasi yang bisa memberikan gambaran yang sebenarnya.

Untuk selanjutnya, kami masih sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun guna kesempurnaan publikasi selanjutnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan dan petunjuknya. Ucapan yang sama pula kami sampaikan kepada Bapak Kepala Biro Pusat Statistik Jakarta, saudara Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Tengah dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, moril maupun materiil sehingga terbitnya publikasi ini.

Akhirnya dengan terbitnya buku ini semoga bermanfaat demi kemajuan Pembangunan di Jawa Tengah.

Semarang, November 1994

KANTOR STATISTIK PROPINSI
JAWA TENGAH
K E P A L A


S A M A D I, MSc
NIP. 340001760

PENJELASAN TEAM PENYUSUN

Upaya perbaikan yang mengarah kepada kelengkapan/kesempurnaan publikasi Pendapatan Regional selalu dilakukan, dengan maksud agar hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan keadaan perekonomian di Jawa Tengah.

Pada publikasi ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai andil cukup berarti terhadap perekonomian Jawa Tengah telah diikut sertakan dalam perhitungan. Cakupan perhitungannya dimasukkan pada sektor Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar para pemakai data selalu memperhatikan penjelasan-penjelasan yang ada, karena disamping masuknya BBM didalam perhitungan ini juga mungkin ada perubahan-perubahan angka yang tidak dapat dihindari.

Guna memudahkan pemakai data serta untuk kelengkapan informasi, publikasi ini disajikan dalam 3 (tiga) buah buku, yaitu:

Buku I berisi : Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1993, Menurut Lapangan Usaha/Sektoral, berikut ulasannya.

Buku II berisi : Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1993, Menurut Penggunaan, berikut penjelasannya.

Buku III berisi : Pendapatan Regional Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha, Berdasarkan Hasil Perhitungan Alokasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, terutama disebabkan oleh keterbatasan data yang masih lemah serta keterlambatan dan kekuranglengkapannya data pendukung. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami nantikan.

TEAM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	i
P R A K A T A	ii
KATA PENGANTAR	iii
PENJELASAN TEAM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL POKOK	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. METODE PENGHITUNGAN	3
2.1. U m u m	3
2.2. Konsumsi Rumah Tangga	4
2.3. Konsumsi Lembaga Swasta Tak Mencari Untung	10
2.4. Konsumsi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan.....	11
2.5. Pembentukan Modal	12
2.6. Ekspor dan Impor	15
III. ULASAN SINGKAT KOMPONEN PENGGUNAAN PDRB JAWA TENGAH TAHUN 1993	17
3.1. Perkembangan Kelompok Konsumsi Selama Pelita V.....	17
3.2. Keadaan Investasi Jawa Tengah Tahun 1989-1993.....	18
3.3. Perkembangan Ekspor Impor Jawa Tengah.....	19

DAFTAR TABEL POKOK

	Halaman
Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-1993 (Jutaan Rupiah)	21
Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993 (Jutaan Rupiah).....	22
Tabel 1.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-1993 (%)	23
Tabel 1.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993 (%)	24
Tabel 1.5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-1993	25
Tabel 1.6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993.....	26
Tabel 1.7. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-1993	27
Tabel 1.8. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993	28
Tabel 1.9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan Tahun 1989-1993	29

Tabel 2.1.	Nilai Konsumsi Penduduk Jawa Tengah Per Kapita Per Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-1993 (Rupiah).....	30
Tabel 2.2.	Nilai Konsumsi Penduduk Jawa Tengah Per Kapita Per Tahun Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993 (Rupiah).	31

<https://jateng.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

Penghitungan Pendapatan Regional dapat ditempuh melalui beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Pengeluaran. Dari ketiga metode tersebut yang telah berhasil diterbitkan secara rutin adalah metode Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran. Untuk itu pada kesempatan ini Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah berusaha secara periodik untuk menyajikan **Produk Domestik Regional Bruto** dengan **Metode Pendekatan Pengeluaran** sebagai kelanjutan terbitan yang lalu.

Dalam penyajian ini dapat dilihat komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang diproduksi oleh wilayah Jawa Tengah sendiri maupun yang berasal dari daerah lain (barang-barang impor). Secara garis besar, barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi, bila dilihat dari segi penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi yang habis sekali pakai, yang dalam hal ini disebut dengan konsumsi antara (intermediate consumption).
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang disebut konsumsi akhir (final consumption).

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam proses produksi, untuk selanjutnya tidak ikut dalam pembahasan ini. Sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga.
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung.
3. Pengeluaran konsumsi Pemerintah.
4. Pembentukan modal tetap bruto.
5. Perubahan stok dari bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.
6. Ekspor.

Barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah untuk memenuhi konsumsi masyarakat di wilayah/region tersebut, bisa menimbulkan transaksi perdagangan dengan wilayah lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis

II. METODE PENGHITUNGAN

2.1. U m u m

Untuk dapat memperoleh angka-angka PDRB menurut penggunaannya, dilakukan penghitungan secara langsung pada komponen-komponen yang tercakup. Namun karena mengalami kesulitan dalam hal kelengkapan data, sehingga ada komponen yang dihitung secara rasional, dengan berdasarkan pada penghitungan sektoral. Dari komponen-komponen yang tercakup dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan seperti telah diuraikan di atas, dapat dinotasikan kedalam suatu rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y + M = C + I_r + I_s + E$$

Dimana:

Y	=	Produk domestik regional bruto
M	=	Impor
C	=	Konsumsi Rumah tangga, Pemerintah, lembaga swasta tidak mencari untung
I_r	=	Pembentukan modal tetap bruto
I_s	=	Perubahan stok
E	=	Ekspor

Rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = C + I_r + I_s + E - M$$

$$Y = C + (I_r + I_s) + (E - M)$$

$$Y = C + I + (E - M)$$

Dimana:

I	=	Investasi
E - M	=	Ekspor neto

Dengan berdasarkan pada persamaan terakhir ini PDRB menurut penggunaan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) komponen besar yaitu:

1. Untuk konsumsi mencakup:

- Konsumsi rumah tangga.

- Konsumsi

- Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- Konsumsi Pemerintah dan Hankam.

2. Untuk investasi meliputi:

- Pembentukan modal tetap bruto.
- Perubahan stok barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.

3. Untuk penggunaan di luar wilayah neto:

- Ekspor ke luar wilayah dan ke luar negeri dikurangi.
- Impor dari luar wilayah dan dari luar negeri.

Untuk menghitung komponen-komponen tersebut banyak sumber data yang dipergunakan, karena setiap komponen mempunyai ruang lingkup yang berbeda, begitu pula metode estimasinya.

2.2. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dengan tujuan untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, tidak membedakan konsumsi yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah/daerah, kemudian dikurangi dengan hasil penjualan neto barang-barang bekas atau afkiran.

Selain pengeluaran untuk konsumsi seperti makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa dihitung pula pengeluaran atas pembelian barang-barang yang tak ada duanya (barang yang tidak diproduksi kembali) seperti: hasil karya seni, barang-barang antik dan sebagainya. Sedangkan pembelian barang yang dapat diraba seperti mobil, tv, radio, meubelier, kulkas dan lain-lain apabila penggunaannya disamping untuk konsumsi rumah tangga juga dipakai untuk usaha, maka nilai pembelian, biaya pemeliharaan dan lain-lainnya harus dipisahkan secara proporsional sesuai dengan penggunaannya.

Pembelian atau pembangunan rumah baru tidak termasuk konsumsi rumah tangga, tetapi pengeluaran terhadap rumah yang ditempati, seperti: sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, telepon, air dan lain-lain merupakan pengeluaran untuk konsumsi. Pengeluaran lain yang termasuk konsumsi yaitu untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lain yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga. Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga ada dua macam konsep yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah domestik suatu region.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk suatu region.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah domestik suatu region meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh anggota rumah tangga baik penduduk itu sendiri maupun penduduk region lain. Yang termasuk penduduk region lain adalah staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, turis asing dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk suatu region adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk region itu saja, tidak termasuk pengeluaran penduduk region lain, menurut konsep ini mencakup pembelian barang dan jasa yang langsung dilakukan penduduk region ini di luar negeri atau region lain.

Oleh karena keterbatasan data yang tersedia tidak mungkin kedua konsep dilakukan, maka cara yang dipakai hanya pada konsep yang kedua, dengan tidak mengurangi tingkat ketelitian dalam penghitungan. Sumber data yang dipergunakan untuk menghitung beberapa pengeluaran rumah tangga adalah hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilakukan dalam rangka Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang ditangani oleh Biro Pusat Statistik.

Untuk estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dipakai hasil pengolahan Susenas tahun 1990 di daerah pedesaan dan perkotaan Jawa Tengah dan sebagai data pembandingan dipergunakan hasil Susenas 1988.

Konsumsi rumah tangga menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional meliputi:

1. Makanan, minuman dan tembakau baik yang termasuk di rumah sendiri maupun masakan yang sudah jadi.
2. Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air.
3. Barang-barang dan jasa-jasa.
4. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
5. Barang-barang tahan lama.
6. Pajak pemakaian dan premi asuransi jiwa.
7. Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara.

Pengeluaran rumah tangga yang dikategorikan tidak termasuk konsumsi adalah:

1. Pengiriman uang/menyumbang.
2. Pengeluaran untuk menabung.
3. Membeli surat-surat berharga/benda tak bergerak.

4. Premi asuransi bukan asuransi jiwa.
5. Membayar/meminjam hutang.
6. Membangun/membeli rumah.
7. Pengeluaran untuk usaha rumah tangga.

Kadang-kadang antara pengeluaran konsumsi dengan pengeluaran bukan konsumsi terutama yang digunakan sebagai usaha rumah tangga tidak bisa dipisahkan sehingga hasil perhitungannya kelebihan (over count) oleh karena itu seharusnya ada pengurangan untuk hal-hal semacam itu, namun hal tersebut dapat menutup pada hal-hal lain yang perhitungannya masih under count.

Dari hasil penghitungan Susenas dapat diperoleh jumlah konsumsi bahan makanan untuk periode satu minggu dan data nilai konsumsi non makanan untuk periode satu bulan. Untuk lebih memudahkan estimasi selama satu tahun diperlukan asumsi-asumsi:

1. Bahan Makanan

Estimasi jumlah konsumsi sebulan (dalam bulan pencacahan) sama dengan 30/7 dikalikan konsumsi seminggu. Nilai Konsumsi setahun diperoleh dari penjumlahan selama 12 bulan dari hasil perkalian konsumsi sebulan dikalikan rata-rata harga pada bulan pencacahan dikalikan relatif harga setahun terhadap harga pada bulan pencacahan.

Secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$C_{ib} = C_{im} \cdot 30/7$$

$$C_{it} = \sum C_{ib} \cdot P_{ij}/P_{ic}$$

$$= \sum C_{ib}/P_{ic} \cdot P_{ij}$$

$$= \sum Q_{ib} \cdot P_{ij}$$

Dimana:

C_{im}	= Nilai Konsumsi per kapita selama seminggu
C_{ib}	= Nilai Konsumsi per kapita selama sebulan
C_{it}	= Nilai Konsumsi per kapita selama setahun
P_{ij}	= Rata-rata harga komoditi i pada bulan j
J	= Dari Januari s/d Desember
P_{ic}	= Rata-rata harga komoditi i pada bulan pencacahan

Q_{ib} = Kwantum per kapita selama sebulan
i = Jenis barang/komoditi

Perkiraan konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun yang tidak ada survei konsumsi dilakukan dengan mempergunakan elastisitas konsumsi tiap jenis barang. Faktor yang dominan berpengaruh pada perubahan konsumsi rumah tangga adalah perubahan pendapatan. Pengaruh tersebut didasarkan suatu anggapan bahwa: "Perubahan jumlah konsumsi makanan dipengaruhi oleh adanya perubahan pendapatan". Anggapan tersebut didasarkan pada kelaziman daripada tingkah laku masyarakat yang antara lain sebagai berikut: "Dengan adanya kenaikan pendapatan, konsumsi bahan makanan non olahan secara alamiah akan berkurang dan sebaliknya konsumsi makanan olahan akan meningkat".

Elastisitas konsumsi yang biasa disebut dengan koefisien elastisitas diperoleh suatu analisis silang antar variabel pendapatan dengan variabel konsumsi dari data hasil pengolahan Susenas 1990. Dalam Susenas 1990 tersebut data pendapatan tidak dapat diperoleh sehingga diasumsikan bahwa total pendapatan sama dengan total pengeluaran, dan data konsumsinya dipakai kwantum konsumsi selama seminggu.

Regresi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan pula konsumsi rumah tangga untuk masing-masing jenis barang. Persamaan regresi yang dipakai adalah persamaan exponential yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Q = a \cdot Y^b$$

Dimana:

Q = Konsumsi
Y = Kelompok pengeluaran
a = Suatu bilangan tetap
b = Elastisitas

Bentuk persamaan ini dapat dimodifikasikan dalam bentuk persamaan linier logaritma dengan alasan untuk mempermudah penghitungan yaitu:

$$\log Q = \log a + b \log Y$$

Elastisitas yang dicari adalah koefisien arah b dari regresi tersebut sedangkan untuk konsumsi rumah tangga dari kelompok bukan makanan diperkirakan dengan menggunakan hasil pengolahan Susenas tahun 1980, 1984, 1988 dan 1990.

Penghitungan konsumsi makanan pada tahun-tahun yang tak ada survei dipakai formulasi:

$$C_{it(n+1)} = C_{it(n)} + b \cdot d_p t \cdot C_{it(n)}$$

$$C_{it(n+1)} = C_{it(n)} \cdot (1 + b \cdot d_p t)$$

Jika:

$$\sum_{i=1} C_{it(n)} = C_{(n)} \text{ dan}$$

$$\sum_{i=1} C_{it(n+1)} = C_{(n+1)}$$

Sehingga secara umum ditulis:

$$C_{(n+1)} = C_{(n)} \cdot (1 + b \cdot d_p t)$$

Dimana:

- $C_{it(n)}$ = Nilai konsumsi bahan makanan i per kapita per tahun pada tahun pencacahan
- C_n = Perkiraan nilai konsumsi per kapita per tahun pada tahun pencacahan
- $C_{(n+1)}$ = Perkiraan nilai konsumsi per kapita per tahun pada tahun ke- $(n+1)$
- b = Elastisitas
- $d_p t$ = Perubahan pendapatan per kapita

Dengan mengalikan nilai konsumsi bahan makanan per kapita setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun didapat perkiraan total nilai konsumsi penduduk pada masing-masing tahun untuk bahan makanan. Apabila ditambahkan nilai konsumsi non makanan setahun diperoleh tabel konsumsi rumah tangga setahun. Untuk mendapatkan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan dideflate dengan Indek Harga Konsumen yang sesuai.

2. Non Makanan

Untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi non makanan digunakan suatu bentuk persamaan/fungsi linier dengan asumsi bahwa konsumsi non makanan tidak akan pernah sampai pada titik jenuh, yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang akan.....

akan semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi tersebut. Persamaan yang digunakan di sini berbeda dengan persamaan yang digunakan dalam mengestimasi pengeluaran konsumsi makanan. Perbedaannya terletak pada satuan yang digunakan.

Pengeluaran konsumsi makanan menggunakan satuan kuantum di mana dalam analisis regresinya dihubungkan antara pendapatan dalam satuan rupiah dengan komoditas dalam bentuk kuantum, sedangkan untuk konsumsi non makanan dihubungkan antara pendapatan dalam satuan rupiah, dengan pengeluaran non makanan dalam satuan rupiah untuk masing-masing jenis barang. Tetapi karena dalam Susenas 1990 data pendapatan tidak dapat diperoleh sehingga diasumsikan bahwa total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Fungsi linier yang digunakan adalah:

$$Y = a + b \cdot x$$

Dimana:

Y	=	Konsumsi
a	=	Suatu bilangan tetap
b	=	Koefisien arah
x	=	Kelompok pengeluaran

Penghitungan konsumsi non makanan pada tahun-tahun yang tidak ada survei dipakai formulasi:

$$C_{(n+1)} = C_n \cdot (1 + b \cdot d_p t)$$

Dimana:

$C_{(n+1)}$	=	Perkiraan nilai konsumsi per kapita per tahun pada tahun ke-(n + 1)
C_n	=	Perkiraan nilai konsumsi per kapita per tahun pada tahun pencacahan
b	=	Elastisitas
$d_p t$	=	Perubahan pendapatan per kapita

Dari formulasi tersebut diperoleh perkiraan nilai konsumsi per kapita per tahun atas dasar harga konstan. Untuk mendapatkan nilai konsumsi atas dasar harga berlaku di inflasi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sesuai dengan jenis kelompoknya (sub kelompoknya) masing-masing.

Dengan mengalikan nilai konsumsi non makanan per kapita setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, didapat **Perkiraan Total** nilai konsumsi penduduk pada masing-masing tahun untuk konsumsi non makanan.

2.3. Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung

Lembaga Swasta yang tidak mencari untung yaitu Lembaga/ Badan Swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat. Seperti: Organisasi Serikat Buruh, Persatuan Para Ahli, Badan Keagamaan, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Kesehatan dan Organisasi-organisasi Kesejahteraan Masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan. Pada umumnya lembaga ini dalam menjalankan kegiatannya ditunjang oleh sumber dana dari sumbangan, transfer dari masyarakat atau iuran dari para anggota.

Sedangkan yang menjadi pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tak mencari untung tersebut meliputi pembelian barang dan jasa dan penerimaan transfer dalam bentuk natura, pembayaran upah dan gaji, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung neto yang dibayarkan lembaga ini, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung pada umumnya berbentuk yayasan tetapi ada juga yang berstatus badan hukum yang lain. Sebagian dari lembaga-lembaga ini ada yang dikelola Pemerintah. Apabila keuangan dan pengawasannya dikelola oleh Pemerintah sebagian besar atau seluruhnya, maka lembaga ini dimasukkan sebagai kegiatan Pemerintah. Namun apabila lembaga ini melakukan kegiatannya sama dengan yang dilakukan Pemerintah tetapi sumber dananya sebagian besar dari swasta sedangkan Pemerintah hanya memberikan sumbangan, maka kegiatan ini dimasukkan sebagai kegiatan lembaga swasta tidak mencari untung.

Pengeluaran konsumsi oleh kegiatan lembaga seperti tersebut di atas sama dengan jumlah biaya pengelolaannya tanpa memperhatikan sumber pembiayaannya, kecuali yang diperoleh dari subsidi Pemerintah. Dalam perhitungan output lembaga swasta tidak mencari untung, subsidi ini harus dikeluarkan, dan dikelompokkan kedalam pengeluaran konsumsi Pemerintah sehingga terlihat peranan lembaga swasta yang tidak mencari untung secara murni. Akan tetapi kegiatan seluruh lembaga swasta yang tidak mencari untung di Jawa Tengah sampai saat ini masih sulit diperoleh datanya yang terinci, sehingga cara yang ditempuh untuk estimasi pengeluaran konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung dengan menjumlahkan output sektor jasa-jasa sosial kemasyarakatan dimana lembaga yang tidak mencari untung banyak berperan. Misalnya: jasa pendidikan, jasa kesehatan, panti asuhan dan sejenisnya, Palang Merah dan sebagainya, yang sudah tercakup dalam penghitungan sektoral.

2.4. Konsumsi Pemerintah, Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan nilai pengeluaran yang dipergunakan sebagai konsumsi Pemerintah adalah sama dengan besarnya nilai produksi yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi. Sedangkan produksi Pemerintah adalah berupa jasa. Nilai daripada jasa ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, penyusutan, pajak tak langsung dikurangi dengan penerimaan jasa yang diberikan (Non Commodity Sales) dan nilai penjualan barang-barang yang diproduksi (Commodity Produced) dari kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan Pemerintah.

Kegiatan Pemerintah meliputi kegiatan administrasi Pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dan Pemerintah Tingkat Desa. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara, seperti: Perum, Perjan, PT (Persero), PN dan sebagainya, karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Pada umumnya kegiatan Pemerintah adalah kegiatan menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat. Jasa tersebut secara ekonomis sulit untuk dinilai. Oleh karena itu kegiatan Pemerintah tidak sama dengan kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan banyak yang tidak dapat diukur, karenanya pendekatan yang dipakai untuk menilai produksinya adalah dengan pendekatan pengeluaran, yaitu yang merupakan pengeluaran konsumsi Pemerintah.

Untuk memperkirakan besarnya nilai produksi yang dikonsumsi sendiri dilakukan dengan jalan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari:

1. Kelompok Pengeluaran Rutin

Meliputi belanja pegawai baik berupa uang maupun in natura, belanja barang pegawai termasuk didalamnya, biaya perjalanan dinas, biaya perbaikan ringan/pemeliharaan dan belanja rutin lainnya.

2. Kelompok Belanja Pembangunan

Dipergunakan untuk pengeluaran yang bersifat rutin, yaitu untuk belanja pegawai diperkirakan sebesar 5,75 % dan untuk belanja barang sebesar 9,13 %.

3. Pengeluaran Penyusutan Barang-barang Modal Pemerintah

Penyusutan barang-barang modal adalah penyediaan dana yang diperuntukan sebagai cadangan yang nantinya akan dipakai untuk membeli barang modal sebagai pengganti barang modal yang telah rusak.

Barang modal yang dimaksud disini mencakup segala macam mesin-mesin dan peralatan, alat-alat transport dan segala jenis bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pembelian barang-barang yang bersifat strategis seperti: pembelian bahan pangan, bahan bakar tidak termasuk pengeluaran belanja barang, karena barang-barang tersebut merupakan stok yang ada pada Pemerintah. Sumber data yang dipergunakan diperoleh dari realisasi anggaran rutin dan anggaran pembangunan baik dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya maupun Tingkat Desa (K.1, K.2, K.3). Anggaran Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Hankam diperoleh dari hasil pengolahan data Badan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat dan data dari Biro Pusat Statistik. Sedangkan Anggaran Pembangunan di Jawa Tengah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, datanya diperoleh dari Bappeda Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk mendapatkan konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menjumlahkan upah dan gaji, belanja barang dan penyusutan dikurangi Non Commodity Sales dan Commodity Produced. Penghitungan konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan 1983 dilakukan sebagai berikut: untuk belanja pegawai dideflate dengan Indeks Harga Konsumen Umum, sedang untuk belanja barang dan Non Commodity Sales serta Commodity Produced dideflate dengan Indeks Harga Perdagangan Besar tanpa ekspor.

2.5. Pembentukan Modal

Seperti telah dimaklumi berdasarkan teori bahwa pembentukan modal meliputi investasi (pembentukan modal tetap) dan increase in stok (perubahan stok).

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dalam suatu daerah/ wilayah ialah seluruh barang modal baru yang dipergunakan sebagai alat memproduksi barang dan jasa lain di suatu daerah. Pengertian barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih dalam pengertian barang-barang tersebut dipergunakan sebagai alat yang tetap dalam proses produksi. Barang-barang modal dapat berupa barang-barang yang didatangkan dari daerah lain ataupun berasal dari pendaan daerah itu sendiri.

Pembelian barang-barang yang tidak diproduksi lagi seperti: tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto, tetapi pengeluaran untuk peningkatan daya guna tanah seperti pembukaan lahan baru/pembukaan hutan/pengeringan rawa-rawa pembongkaran tanah padas dijadikan lahan sawah/pemukiman perluasan areal pertambangan adalah merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembelian barang-barang modal bekas/afkiran dari wilayah/daerah sendiri bukan merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto, karena barang-barang tersebut telah terhitung sebagai barang modal pada waktu pembelian yang pertama, kecuali pembelian barang-barang modal bekas yang berasal dari daerah lain atau dari luar Negeri.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal sehingga akan mengakibatkan bertambah panjangnya umur pemakaian atau akan menambah kapasitas produksi termasuk juga sebagai pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembentukan Modal Tetap Bruto Meliputi:

- a. Pembentukan modal tetap dalam bentuk bangunan/konstruksi terdiri dari:
 - Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
 - Bangunan/konstruksi lainnya seperti: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik, instalasi, komunikasi dan sebagainya.
 - Perbaikan besar dari bangunan-bangunan tersebut.
- b. Pembentukan modal berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan terdiri dari:
 - Alat-alat transport/angkutan.
 - Mesin-mesin/alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam pertanian, pertambangan, industri, listrik dan sebagainya.
 - Mesin-mesin peralatan pada kantor, toko, hotel, rumah sakit dan sebagainya.
- c. Penanaman baru untuk tanaman keras/perluasan perkebunan. Tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar untuk penanaman dan perawatan sebelum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah adalah termasuk di dalamnya.
- d. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya, atau dipakai tenaganya dan lain-lain terkecuali ternak yang untuk dipotong.

- e. Margin perdagangan/makelar, service charge dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten, hak cipta dan barang-barang bekas.

2. Perubahan Stok

Pengertian stok disini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun barang yang sedang dalam proses.

Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis seperti: bahan bakar, bahan pangan yang akan dilempar kepasar pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan. Gedung-gedung/bangunan yang dalam proses tidak termasuk stok tetapi dicakup dalam pembentukan modal tetap bruto.

Stok pada pemeliharaan peternakan adalah termasuk yang hanya dipergunakan sebagai ternak potong. Sedangkan pemeliharaan ternak diperuntukan pembiakan, diambil tenaganya, diambil bulunya serta susunya termasuk pembentukan modal tetap. Namun perlu disadari bahwa antar kedua tujuan tersebut adalah sulit didalam prakteknya, karena pada akhirnya semua ternak akan dipotong juga.

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode yakni:

a. Metode Langsung

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Laporan neraca keuangan dari perusahaan survei tahunan stok barang-barang ekspor. Nilai stok diperoleh berdasarkan laporan stok pada awal tahun dan akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

Dalam menilai barang-barang konsumsi antara dan penyediaan barang-barang jadi dengan harga pasar untuk suatu periode membutuhkan asumsi-asumsi mengenai:

- i. Kesepakatan penilaian yang dipakai dalam perhitungan data stok pada waktu membuat laporan.
- ii. Kurun waktu pembentukan stok.
- iii. Komposisi tiap-tiap barang pada stok, juga indeks harga yang digunakan untuk memperoleh rata-rata harga selama periode perhitungan.

b. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Yaitu dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini mungkin tersedia hanya untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu, karena keterbatasan data, maka komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung secara sektoral dikurangi dengan komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

2.6. Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor dan impor meliputi suatu transaksi yang terjadi atas suatu barang dan jasa antara masyarakat suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain atau dengan luar negeri.

Transaksi ini menyangkut:

- Kegiatan ekspor dan impor barang.
- Kegiatan ekspor dan impor jasa-jasa, seperti: jasa pengangkutan, jasa komunikasi, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima para pedagang suatu wilayah atas transaksi perdagangan di luar wilayah.
- Pembelian atas barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu kapal merapat atau mendarat di pelabuhan wilayah lain atau di luar negeri.
- Kapal-kapal penangkap ikan dari suatu wilayah yang menjual hasil tangkapannya langsung ke kapal asing atau ke luar negeri.
- Transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestik oleh bukan penduduk wilayah sebagai souvenir, dan sebaliknya yaitu pembelian barang dan jasa langsung di luar wilayah oleh penduduk suatu region.
- Hal-hal dan kejadian ekspor dan impor atau perdagangan antar wilayah.

Catatan:

Barang-barang yang hanya melewati suatu wilayah sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan untuk menuju atau kembali ke suatu tempat tujuan semula tidak termasuk di sini.

Untuk mendapatkan data ekspor dan impor yang sesuai dengan konsep dan ruang lingkup di atas dewasa ini masih sulit diperoleh. Namun demikian estimasi nilai ekspor dan impor diusahakan agar mendekati konsep dan lingkungannya. Untuk daerah Jawa Tengah yang dapat diliput adalah kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut yang menyangkut perdagangan dengan luar negeri dan antar pulau. Untuk kegiatan ekspor-impor lewat darat karena Jawa Tengah terletak berbatasan dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta diestimasi berdasarkan arus barang yang lewat melalui jembatan timbang.

Mengingat jembatan timbang telah berakhir kegiatannya pada tahun 1982, maka untuk tahun berikutnya diperkirakan berdasarkan persentase tahun sebelumnya. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dari Administratur Pelabuhan di Jawa Tengah serta dari DLLAJR Propinsi Jawa Tengah.

Untuk mendapatkan data ekspor dan impor atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi. Sebagai deflator untuk ekspor adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia sektor ekspor, sedangkan untuk komponen-komponen impor dan perdagangan antar pulau dipakai IHPB Indonesia tanpa ekspor sebagai deflatornya.

III. ULASAN SINGKAT KOMPONEN PENGGUNAAN PDRB JAWA TENGAH TAHUN 1993

Jawa Tengah selama Pelita V mampu mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi, hal ini memantapkan Jawa Tengah untuk menyongsong PJP tahap II. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dalam hal ini yang dilihat adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yang merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kurun waktu 1989-1993 rata-rata mencapai 6,92%, pertumbuhan yang tertinggi dicapai tahun 1992 sebesar 7,44%, dan tahun 1993 lebih rendah yaitu sebesar 6,1%. Dengan pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi akan berpengaruh pada struktur permintaan akhir di suatu daerah.

Secara umum PDRB dikelompokkan menjadi 3 kelompok penggunaan yaitu konsumsi, investasi dan kelompok penggunaan diluar wilayah netto. Ketiga kelompok ini adalah merupakan komponen permintaan akhir dari seluruh Produk Domestik Jawa Tengah, yang mempunyai efek multiplier. Bila salah satu komponen berubah maka akan berpengaruh pada komponen yang lain, begitu pula apabila terjadi kenaikan PDRB maka masing-masing komponen akan berubah sesuai dengan polanya masing-masing.

3.1. Perkembangan Kelompok Konsumsi selama Pelita V

Pada kurun waktu tahun 1989-1993 atau dapat diidentikkan dengan pelita V, kelompok konsumsi masih menduduki tingkat pengguna PDRB terbesar yaitu rata-rata 65,22%, diantaranya 50,78% adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, bila dihitung atas dasar harga konstan 1983. Namun demikian ada suatu kecenderungan menurun, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB tidak selamanya dipakai untuk meningkatkan konsumsi, tetapi sudah ada tendensi meningkatkan investasi. Pada tabel 1.4 penyajian atas dasar harga konstan 1983 ditunjukkan peranan konsumsi rumah pada awal pelita V sebesar 52,82% dan pada akhir pelita V turun menjadi 48,82%.

Pemakaian konsumsi yang lain adalah konsumsi Pemerintah dan konsumsi Lembaga Swasta tidak mencari untung. Pada tahun 1993 konsumsi Pemerintah mencapai Rp. 3,76 triliun atas dasar harga berlaku atau 11% dari total PDRB. Sedangkan konsumsi Lembaga Swasta tidak mencari untung hanya 0,97% pada tahun 1993.

Perkembangan PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan yang ditunjukkan oleh indeks perkembangan, sebesar 203,03 berarti PDRB Jawa Tengah berkembang lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 1983. Tidak demikian halnya kelompok konsumsi. Untuk konsumsi rumah tangga baru mendekati 1,5 kali dan konsumsi Pemerintahan telah mencapai 1,52 kali. Dengan demikian perkembangan konsumsi di Jawa Tengah

lebih lambat dibandingkan PDRB. Ditunjukkan pula rata-rata pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan selama pelita V sebesar 4,54% juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara riil. Pada tabel 1.8 ditunjukkan indeks berantai dari masing-masing komponen penggunaan PDRB yang menyatakan pertumbuhan setiap tahun.

Perbandingan penyajian atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan 1983 untuk masing-masing komponen konsumsi akan mencerminkan tingkat perubahan harga atau lebih dekat disebut dengan laju inflasi seluruh Jawa Tengah. Pada tabel 1.9 diperlihatkan indeks perkembangan harga untuk semua jenis penggunaan. Untuk konsumsi rumah tangga tahun 1993 menunjukkan 209,45 atau dapat dikatakan bahwa harga-harga komoditas dalam konsumsi rumah tangga meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding dengan harga yang terjadi pada tahun 1983. Apabila dihitung selama pelita ke V terjadi perubahan harga rata-rata 7,95% per tahun, sedangkan konsumsi pemerintahan yang kontribusinya mencapai 12,63% pada tahun 1993 mengalami kenaikan harga rata-rata 7,05 per tahun. Tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pada konsumsi rumah tangga.

3.2 Keadaan Investasi Jawa Tengah tahun 1989-1993

Investasi adalah merupakan unsur utama dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi dan perluasan tenaga kerja. Upaya untuk merangsang para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah telah dilakukan dengan berbagai cara. Hasilnya cukup banyak investor yang tertarik, hal ini tercermin pada penyajian pembentukan modal tetap bruto dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pengertian investasi dalam penyajian ini adalah merupakan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stock. Pembentukan modal tetap bruto adalah merupakan penambahan barang-barang modal dari seluruh sektor perekonomian yang terjadi pada satu tahun.

Pada awal pelita V menurut perhitungan atas dasar harga berlaku pembentukan modal Jawa Tengah telah mencapai Rp. 3,73 trilyun dan pada tahun 1993 berkembang menjadi Rp. 7,85 trilyun, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 20,4% pertahun. Dibandingkan tahun 1983 pembentukan modal tetap bruto tahun 1993 telah berkembang 4,9 kali lipat. Angka ini ditunjukkan oleh indeks perkembangan tahun 1993 sebesar 490,15.

Apabila dihitung atas dasar harga konstan dimana pengaruh harga telah dihilangkan pada tahun 1993 mencapai Rp. 3,55 trilyun atau rata-rata pertumbuhannya pertahun 13,25% selama pelita V. Dibandingkan pertumbuhan pada periode 1983-1993 hanya sebesar 8,29%. Disini menunjukkan bahwa pada pelita V pembentukan modal tetap bruto yang terjadi jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. Pertumbuhan rata-

rata yang terjadi pada pembentukan modal terlihat lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 6,92%. Sehingga Jawa Tengah lebih mapan untuk menyongsong pembangunan jangka panjang selanjutnya.

3.3. Perkembangan Ekspor Impor Jawa Tengah

Dengan investasi yang cukup tinggi selama Pelita V diharapkan akan meningkatkan produk dalam negeri yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan ekspor Jawa Tengah dan sebaliknya apabila kebutuhan bahan baku meningkat sedangkan komoditas tersebut tak tersedia, maka akan mendorong kegiatan impor bahan baku yang akan memacu produksi dalam negeri.

Nilai ekspor luar negeri tahun 1990 dari Jawa Tengah atas dasar harga berlaku bernilai Rp. 1,48 triliun. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 532,59 milyar dari tahun sebelumnya atau naik sebesar 56,11%. Kenaikan sebesar itu dicapai pada waktu Pelabuhan Tanjung Mas mulai dioperasikan lagi setelah pembangunan perluasannya selesai. Pada tahun-tahun berikutnya meningkat secara rata-rata 17,56% per tahun, sehingga pada tahun 1993 telah mencapai Rp. 2,39 triliun. Untuk mengetahui pertumbuhan ekspor luar negeri secara riil disajikan jumlah perhitungan atas dasar harga konstan tahun 1983. Pada tabel 1.8. dapat dilihat bahwa ekspor luar negeri Jawa Tengah secara rata-rata meningkat 21,36% selama kurun waktu 1989 - 1993, sehingga pada tahun 1993 telah mencapai Rp. 1,06 triliun atau 7,12% dari seluruh Produk Domestik Regional Bruto.

Perkembangan ekspor akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan harga barang-barang ekspor di pasaran luar negeri. Semakin tinggi perkembangan harganya akan mendorong produsen dalam negeri untuk berlomba memasarkan produknya ke luar negeri. Tabel 1.9. memperlihatkan perkembangan harga berbagai komponen penggunaan PDRB dibanding keadaan harga tahun 1983. Pada tahun 1990 indeks implisit barang-barang ekspor luar negeri menunjukkan 195,0 artinya bahwa harga barang-barang ekspor telah berkembang 1,95 kalau dibandingkan dengan tahun 1983. Dibanding tahun sebelumnya nampaknya harga-harga barang ekspor tidak berubah. Hal ini menunjukkan perubahan yang terkecil selama Pelita V, yaitu nol persen. Namun disayangkan kejadian ini justru terjadi pada saat pelabuhan Tanjung Mas baru dibuka kembali untuk ekspor luar negeri. Pada tahun berikutnya pertumbuhan harga naik rata-rata 5% selama tiga tahun terakhir, sehingga tahun 1993 dibanding tahun 1983 telah berkembang 2,26 kali.

Peranan barang-barang impor dalam memacu produk Jawa Tengah baik melalui penyediaan bahan baku maupun untuk penambahan barang modal cukup besar. Barang-barang impor ini dapat berasal dari luar negeri langsung didatangkan ke pelabuhan Jawa Tengah atau barang impor luar negeri yang didatangkan lewat darat, karena pelabuhan

impornya tidak di Jawa Tengah.

Nilai impor luar negeri Jawa Tengah pada tahun 1990 mencapai Rp. 1,57 triliun atau naik sebesar Rp. 644,8 milyar (69,66%) dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang terbesar dari kurun waktu 1989 - 1993 atas dasar harga berlaku. Pada tahun berikutnya nilai impor ini cenderung turun sampai mencapai yang terendah pada tahun 1992 yaitu -5,42%. Untuk tahun 1993 naik 9,58% sehingga mencapai nilai Rp. 1,88 triliun. Sedangkan perkembangan harga barang-barang impor naik rata-rata 4,37% per tahun selama Pelita V. Berarti selama Pelita V pertumbuhan harga impor secara rata-rata relatif lebih tinggi, namun pada tahun 1993 perubahan harga impor lebih rendah dibanding barang ekspor yang merupakan suatu indikasi bahwa barang-barang dalam negeri dapat bersaing dipasaran luar negeri.

Perbandingan nilai ekspor dengan impor yang lazim disebut Neraca Perdagangan akan menunjukkan daerah itu defisit atau surplus dalam perdagangan. Jawa Tengah pada tahun 1990 mengalami defisit pada Neraca Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp. 88,8 milyar, namun defisit itu berangsur-angsur menurun bahkan pada tahun 1993 mengalami surplus sebesar Rp. 502,3 milyar.

Arus barang Jawa Tengah selain ekspor keluar negeri dikatakan pula ekspor darat dan antar pulau. Seperti kegiatan arus barang ekspor, arus barang antar pulau adalah menunjukkan kelebihan produk Jawa Tengah yang merupakan sentra produksi industri maupun sentra produksi pertanian. Arus barang antar pulau keluar pada tahun 1989 mencapai Rp. 3,87 triliun atau 20,7% dari seluruh PDRB Jawa Tengah. Dibandingkan nilai arus yang masuk bernilai Rp. 3,18 triliun, berarti masih surplus sebesar Rp. 696 milyar. Sedangkan pada akhir Pelita V Neraca Perdagangan antar pulau Jawa Tengah mengalami defisit sebesar Rp. 78,6 milyar.

Tabel 1.1.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH MENURUT
KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1989 — 1993 (JUTAAN RUPIAH)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.239.183,40	10.096.815,33	11.027.972,57	13.270.837,60	15.155.421,14
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	193.326,04	213.198,96	254.941,48	283.333,16	331.831,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	2.419.458,89	2.654.870,2	3.086.407,11	3.512.386,11	3.758.959,91
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.733.458,08	4.478.539,18	5.517.888,00	6.491.537,19	7.845.126,82
5. Perubahan Stok	1.296.605,98	1.418.435,07	2.289.405,67	2.270.332,12	2.642.773,67
6. Ekspor Barang & Jasa	8.091.361,53	10.591.202,21	13.388.988,43	15.438.226,70	16.641.978,06
- Ekspor Luar Negeri	949.134,05	1.481.721,35	1.752.348,73	2.249.333,71	2.385.902,61
- Ekspor Antar Pulau	3.873.477,33	4.513.600,88	5.217.280,96	5.929.002,39	5.946.914,91
- Ekspor Antar Darat	3.268.750,15	4.595.879,98	6.419.358,74	7.259.890,60	8.309.160,54
7. Impor Barang & Jasa	6.281.243,70	7.763.778,13	10.385.360,62	11.065.971,99	12.210.434,49
- Impor Luar Negeri	925.698,00	1.570.530,22	1.817.535,65	1.718.938,80	1.883.574,96
- Impor Antar Pulau	3.177.483,93	3.618.884,92	3.359.153,26	5.628.182,67	6.025.503,35
- Impor Antar Darat	2.178.063,77	2.574.362,99	3.208.671,71	3.718.850,52	4.301.356,18
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.692.151,22	21.698.283,14	25.980.442,64	30.200.680,97	34.165.656,49

*) Angka Sementara

Tabel 1.2.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH MENURUT
KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983
TAHUN 1989 — 1993 (JUTAAN RUPIAH)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.989.566,94	6.269.502,41	6.652.097,90	6.908.474,59	7.235.652,22
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	141.340,87	145.548,17	155.177,72	161.480,20	169.220,3
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Bankam	1.581.751,03	1.630.054,32	1.707.948,61	1.829.892,00	1.871.437,56
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.157.027,31	2.418.138,98	2.768.823,95	3.068.466,85	3.546.061,00
5. Perubahan Stok	473.403,41	240.043,34	329.176,14	136.525,51	498.094,86
6. Ekspor Barang & Jasa	4.614.849,86	5.693.639,14	6.735.953,66	7.295.436,91	7.335.918,56
- Ekspor Luar Negeri	486.735,41	759.857,10	863.225,98	1.061.006,47	1.055.709,12
- Ekspor Antar Pulau	2.239.004,24	2.449.582,59	2.625.707,58	2.809.953,74	2.619.786,30
- Ekspor Antar Darat	1.889.110,21	2.484.259,45	3.247.020,10	3.424.476,70	3.660.423,14
7. Impor Barang & Jasa	3.617.384,43	4.262.960,41	5.346.590,86	5.430.276,53	5.835.673,80
- Impor Luar Negeri	520.054,75	822.267,13	904.246,59	826.412,88	892.689,55
- Impor Antar Pulau	1.836.694,76	2.010.491,62	2.829.182,67	2.865.198,09	3.030.203,11
- Impor Antar Darat	1.260.644,92	1.430.201,66	1.613.161,60	1.738.665,56	1.912.781,14
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.340.444,99	12.134.025,95	13.002.587,13	13.969.999,53	14.821.710,71

*) Angka sementara

Tabel 1.3. **DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,43	46,55	45,53	43,94	44,36
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	1,03	0,98	0,98	0,94	0,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	12,94	12,24	11,88	11,63	11,00
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	19,97	20,65	21,24	21,49	22,96
5. Perubahan Stok	6,94	6,54	8,81	7,52	7,74
6. Ekspor Barang & Jasa	43,29	48,83	51,53	51,12	48,71
- Ekspor Luar Negeri	5,08	6,83	6,74	7,45	6,98
- Ekspor Antar Pulau	20,72	20,81	20,08	19,63	17,41
- Ekspor Antar Darat	17,49	21,19	24,71	24,04	24,32
7. Impor Barang & Jasa	33,60	35,80	39,97	36,64	35,74
- Impor Luar Negeri	4,25	7,24	7,00	5,69	5,51
- Impor Antar Pulau	17,00	16,69	20,63	18,64	17,64
- Impor Antar Darat	11,65	11,87	12,35	12,31	12,59
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

Tabel 1.4. **DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,82	51,67	51,16	49,45	48,82
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	1,25	1,20	1,19	1,16	1,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	13,95	13,43	13,14	13,10	12,63
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	19,02	19,93	21,29	21,96	23,94
5. Perubahan Stok	4,17	1,98	2,53	0,98	3,36
6. Ekspor Barang & Jasa	40,69	46,92	51,80	52,22	49,49
- Ekspor Luar Negeri	4,29	6,26	6,64	7,59	7,12
- Ekspor Antar Pulau	19,74	20,19	20,19	20,11	17,68
- Ekspor Antar Darat	16,66	20,47	24,97	24,51	24,70
7. Impor Barang & Jasa	31,90	35,13	41,12	38,87	39,37
- Impor Luar Negeri	4,59	6,78	6,95	5,92	6,02
- Impor Antar Pulau	16,20	16,37	21,76	20,51	20,44
- Impor Antar Darat	11,12	11,79	12,41	12,45	12,91
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

Tabel 1.5. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1989 — 1993 (%)

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi	187,55	204,96	204,10	269,39	307,65
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	189,62	209,11	25,05	277,90	325,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	197,48	216,69	25,93	286,68	306,81
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	233,26	279,81	34,75	405,58	490,15
5. Perubahan Stok	192,84	210,96	34,50	337,67	393,06
6. Ekspor Barang & Jasa	234,09	306,42	38,36	446,65	481,47
- Ekspor Luar Negeri	805,33	1257,22	148,84	1908,53	2024,40
- Ekspor Antar Pulau	335,68	391,15	45,13	513,81	515,36
- Ekspor Antar Darat	149,62	210,37	29,83	332,31	380,33
7. Impor Barang & Jasa	134,14	165,80	22,79	236,32	260,76
- Impor Luar Negeri	48,55	82,38	9,33	90,16	98,80
- Impor Antar Pulau	240,95	274,42	40,39	426,79	456,92
- Impor Antar Darat	149,45	176,65	22,17	255,18	295,15
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	256,05	297,11	355,89	413,70	468,01

*) Angka sementara

**Tabel 1.6. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	121,58	127,27	135,03	140,24	146,88
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	138,63	142,76	152,20	158,38	164,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	129,10	133,05	139,40	149,36	152,75
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	134,77	151,08	172,99	191,71	221,68
5. Perubahan Stok	70,41	35,70	48,96	20,31	74,08
6. Ekspor Barang & Jasa	133,51	164,73	194,88	211,07	212,24
- Ekspor Luar Negeri	412,99	644,73	732,43	900,25	895,75
- Ekspor Antar Pulau	194,03	212,28	227,55	243,51	227,03
- Ekspor Antar Darat	86,47	111,71	148,63	156,75	167,55
7. Impor Barang & Jasa	77,25	91,04	114,18	115,97	124,63
- Impor Luar Negeri	27,28	43,33	47,43	43,35	46,82
- Impor Antar Pulau	139,28	152,46	214,54	217,27	229,78
- Impor Antar Darat	86,50	98,14	110,69	119,30	111,25
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	155,34	166,22	178,11	191,36	203,03

*) Angka Sementara

Tabel 1.7.

**INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110,95	109,28	117,15	112,20	114,20
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	106,20	110,28	119,58	111,14	117,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	108,96	109,73	116,26	113,79	107,02
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	117,48	119,96	123,21	117,65	120,85
5. Perubahan Stok	173,74	109,40	161,40	99,17	116,40
6. Ekspor Barang & Jasa	113,85	130,90	126,42	115,31	107,80
- Ekspor Luar Negeri	110,11	156,11	119,26	128,36	106,07
- Ekspor Antar Pulau	111,60	116,53	115,59	113,64	100,30
- Ekspor Antar Darat	117,84	140,60	139,68	113,09	114,45
7. Impor Barang & Jasa	117,66	123,60	133,77	106,55	110,34
- Impor Luar Negeri	169,85	169,66	115,73	94,58	109,58
- Impor Antar Pulau	133,14	113,89	148,09	105,02	107,06
- Impor Antar Darat	90,48	118,20	124,64	115,90	115,66
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,82	116,03	119,78	116,24	113,13

*) Angka Sementara

Tabel 1.8.

**INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103,35	104,68	106,10	103,85	104,74
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	102,90	102,98	106,62	104,06	104,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Bankam	105,14	103,05	104,78	107,14	102,27
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	108,76	112,11	114,50	110,82	115,63
5. Perubahan Stok	186,32	50,71	137,13	41,47	384,84
6. Ekspor Barang & Jasa	106,18	123,38	118,31	108,31	100,55
- Ekspor Luar Negeri	103,33	156,11	113,60	122,91	99,50
- Ekspor Antar Pulau	101,92	109,41	107,19	107,02	93,23
- Ekspor Antar Darat	112,57	131,50	130,70	105,47	106,89
7. Impor Barang & Jasa	107,39	117,85	125,42	101,57	107,47
- Impor Luar Negeri	156,58	158,11	109,97	91,39	108,02
- Impor Antar Pulau	121,60	109,46	140,72	101,27	105,76
- Impor Antar Darat	82,63	113,45	112,79	107,78	110,01
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	106,46	107,00	107,16	107,44	106,10

*) Angka Sementara

Tabel 1.9.

**INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
TAHUN 1989 — 1993 (%)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	154,26	161,05	177,81	192,10	209,45
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	136,78	146,48	164,29	175,46	197,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam	152,96	162,87	180,72	191,94	200,86
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	173,08	185,21	199,29	211,56	221,11
5. Perubahan Stok	273,89	590,91	695,50	1662,94	530,58
6. Ekspor Barang & Jasa	175,33	186,02	198,77	211,61	226,86
- Ekspor Luar Negeri	195,00	195,00	203,00	212,00	226,00
- Ekspor Antar Pulau	173,00	184,26	198,70	211,00	227,00
- Ekspor Antar Darat	173,03	185,00	197,70	212,00	227,00
7. Impor Barang & Jasa	173,64	182,12	194,24	203,78	209,24
- Impor Luar Negeri	178,00	191,00	201,00	208,00	211,00
- Impor Antar Pulau	173,00	180,00	189,42	196,43	198,85
- Impor Antar Darat	172,77	180,00	198,91	213,89	224,87
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	164,83	178,75	199,81	216,18	230,51

*) Angka Sementara

Tabel 2.1.

**NILAI KONSUMSI PENDUDUK JAWA TENGAH PER KAPITA PER TAHUN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1989 - 1993
(R U P I A H)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. M A K A N A N	204.270,62	220.308,33	262.022,43	297.948,46	341.887,72
2. PERUMIH & BAHAN BAKAR	45.070,01	49.803,51	54.618,98	58.108,09	63.359,09
3. BARANG-BARANG & JASA	25.870,69	27.994,95	32.350,62	35.519,70	40.904,74
4. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	17.006,10	18.087,74	19.399,88	20.142,04	21.228,00
5. BARANG TAHAN LAMA	17.912,70	19.413,21	22.119,53	23.970,87	27.292,87
6. PJK PEMKH & ASURANSI	3.343,63	3.566,73	3.935,87	4.213,55	4.611,39
7. KEP. PESTA & UPACARA	15.088,96	16.137,10	17.893,11	19.241,11	21.139,45
TOTAL KONSUMSI	328.562,71	355.311,57	412.340,42	459.143,82	520.423,26

*) Angka Sementara

Tabel 2.2.

**NILAI KONSUMSI PENDUDUK JAWA TENGAH PER KAPITA PER TAHUN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 TAHUN 1989 - 1993
(R U P I A H)**

JENIS PENGELUARAN	1989	1990	1991	1992	1993*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. M A K A N A N	127.241,24	134.208,06	144.396,80	150.486,62	159.024,94
2. PERUMIH & BAHAN BAKAR	30.407,52	30.589,96	30.811,18	31.017,45	31.197,54
3. BARANG-BARANG & JASA	18.914,09	19.111,79	19.691,17	20.243,76	20.736,46
4. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	11.133,29	11.174,93	11.191,16	11.206,21	11.219,28
5. BARANG TAHAN LAMA	13.095,99	13.253,15	13.463,71	13.661,73	13.835,99
6. PJK PEMKH & ASURANSI	2.219,32	2.224,48	2.226,42	2.228,21	2.229,77
7. KEP PESTA & UPACARA	10.015,24	10.064,30	10.121,42	10.175,10	10.221,66
TOTAL KONSUMSI	213.026,69	220.626,67	231.901,86	239.019,08	248.465,66

*) Angka Sementara